OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Emanuela S. Ch. A. Daimboa
NPP. 32.1049
Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
Program Keuangan Publik
Email: 32.1049@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Regional budget management using the Regional Government Information System (Sipd) is not optimal in Jayawijaya Regency, Papua Pegunungan Province.* ***Purpose:*** *This study aims to determine the optimization of regional budget management through the regional government information system in Jayawijaya Regency.* ***Method:*** *The research method used by researchers in this study is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* ***Result:*** *The results of the study obtained by researchers indicate that the implementation of SIPD in Jayawijaya Regency is not optimal, but the local government has made a number of improvements, such as HR training, provision of supporting facilities, and increased coordination between Regional Apparatus Organization.* ***Conclusion:*** *The process of optimizing the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Jayawijaya Regency is still not running optimally. This can be seen from several aspects, especially in the dimension of output achievement, where technical problems or disruptions are still found in the application during its implementation. In addition, the limited number and competence of Human Resources (HR) who manage the system are also factors that cause services through SIPD to not be utilized optimally. However, the Regional Financial and Asset Management Agency of Jayawijaya Regency faces several obstacles including minimal socialization, still having technical operational problems, and lack of response or follow-up from the central government to various obstacles faced in the field.*

Keywords: *SIPD, Regional Budget Management, Optimization.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) yang belum optimal di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan anggaran daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah di Kabupaten Jayawijaya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Jayawijaya belum optimal, namun pemerintah daerah telah melakukan sejumlah perbaikan, seperti pelatihan SDM, penyediaan sarana pendukung, dan peningkatan koordinasi antar OPD. **Kesimpulan:** Proses optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, khususnya pada dimensi pencapaian output, di mana masih ditemukan masalah teknis atau gangguan pada aplikasi selama pelaksanaannya. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola sistem juga menjadi faktor yang menyebabkan pelayanan melalui SIPD belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya menghadapi beberapa hambatan meliputi minimnya sosialisasi, masih terdapat masalah teknis operasional, dan kurangnya respon atau tindak lanjut dari pemerintah pusat terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Kata Kunci: SIPD, Pengelolaan Anggaran Daerah, Optimalisasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola dan standar akuntansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan pentingnya sistem informasi yang menyajikan data keuangan dan pembangunan secara transparan. Dalam konteks transformasi digital, pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat untuk mendukung tata kelola keuangan dan pembangunan yang efektif dan efisien.

SIPD dirancang untuk menyajikan informasi keuangan dan pembangunan daerah secara lengkap, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan dan pengelolaan aset. Ketersediaan dan kualitas data dari pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan implementasi sistem ini. *Another benefit offered in the utilization of information technology is the speed in processing information, especially about regional financial accounting information systems* (Yamin et al., 2025). Tujuan utama dari penggunaan SIPD adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya, telah mulai menerapkan SIPD sejak tahun 2020 dengan harapan dapat memperbaiki tata

kelola keuangan daerah.

Namun, implementasi SIPD di Jayawijaya menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa OPD masih kesulitan menggunakan sistem ini secara maksimal karena minimnya pelatihan teknis, infrastruktur teknologi yang terbatas, serta kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Ketidaksesuaian data dan lambannya proses input juga menjadi masalah yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dan realisasi APBD. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan utama dan merumuskan strategi optimalisasi agar tujuan utama dari SIPD dapat tercapai secara efektif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) yang belum optimal di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu masalah utama adalah belum semua Organisasi Perngkat Daerah (OPD) mampu menggunakan SIPD secara maksimal. Beberapa OPD, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan, menghadapi tantangan besar dalam mengoperasikan sistem. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis bagi aparatur, kurangnya dukungan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang andal, serta perangkat keras yang memadai.

Selain itu, tingkat kompetensi sumber daya manusia yang beragam turut menjadi penghambat, terutama di OPD yang memiliki keterbatasan tenaga ahli di bidang teknologi informasi. Di sisi lain, meskipun SIPD bertujuan untuk menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran, implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian, seperti data yang tidak sinkron dan proses penginputan yang memakan waktu lama. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD).

Masalah-masalah tersebut menyebabkan manfaat SIPD dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya dirasakan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi OPD dalam implementasi SIPD, serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Penelitian Nadya Balqis dan Zuhrizal Fadhly berjudul Efektifitas Penerapan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Aceh Barat (Balqis et al., 2021), menemukan bahwa SIPD memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja (DISNAKER). Penelitian Wawan Giri Santoso (2022) berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Subang (Santoso, 2022), menemukan bahwa kabupaten Subang masih terdapat kekurangan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga implementasi SIPD di Kabupaten

Subang mengalami beberapa hambatan. Penelitian Muhammad Zaky Harahap (2021) berjudul Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Harahap, 2022), menemukan bahwa Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, dan tujuan dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) itu sendiri belum tercapai dengan maksimal. Penelitian Nadya Prameswari berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga (Prameswari, 2021), menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahah Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK. Penelitian Ganjar Pamungkas berjudul Analisis Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat (Pamungkas, 2022), menemukan bahwa implementasi SIPD pada Pemerintah DIY dan Pemerintah Provins Jawa Barat belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Nurmila Daud, Harun Blongkod, dan Nilawaty Yusuf berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (*The Effect of the Implementation of Local Government Information Systems (SIPD) and Human Resources on Regional Financial Management Accountability*) (Daud et al., 2025), menemukan bahwa SIPD dan kualitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD membantu meningkatkan efisiensi dan pengendalian transaksi keuangan.Penelitian Grace T. Pontoh, Darwis, dan Darmawati berjudul Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah Melalui Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Efektif *(Improved Regional Financial Reporting Through Effective Information Technology and Regional Financial Accounting Systems)* (Pontoh & Reza, 2024), menemukan bahwa kualitas informasi teknologi, kualitas sistem akuntansi keuangan daerah, dan lingkungan pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Dengan kata lain, penggunaan sistem informasi yang baik seperti SIPD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Penelitian Ermina Siregar, Iskandar Sam, dan Wiwik Tiswiyanti berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal terhadap Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi (*The Influence of the Implementation of Local Government Information Systems, Human Resources, and Internal Control on the Qualitative Characteristics of Jambi City Government Financial Reports*) (Siregar et al., 2025), menemukan bahwa implementasi SIPD, kompetensi SDM, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah, terutama pada aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yakni penelitian Nadya Balqis dan Zuhrizal Fadhly (Balqis et al., 2021) dan penelitian Wawan Giri Santoso (Santoso, 2022), dimana konteks penelitian yang dilakukan membahas optimalisasi pengelolaan anggaran daerah

menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Perbedaan berikutnya terletak pada pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni, menggunakan pendapat dari Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu pencapaian *output*, pencapaian *outcome*, dan pencapaian *impact*. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kabupaten Jawawijaya.

1.5. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan anggaran daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jayawijaya.

II. METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni cara untuk menjelajahi dan memahami makna dari perilaku individu dan kelompok, serta untuk menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih berorientasi pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian (Danim, 2002). Dan dari hasil yang diperoleh dapat terbentuk sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang ada yaitu tentang optimalisasi pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Peneliti mengumpulkan data secara triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Teknik-teknik ini merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diamati. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat valid (menggambarkan kebenaran), reliabel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat membantu memahami masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap empat orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan, dan Jabatan Pelaksana yang mengelola SIPD. Informan-informan diatas dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terkait penelitian yang dilakukan yaitu dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapatkan informasi terkait optimalisasi pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun analisisnya menggunakan teori peran oleh Soejana Soekanto (Soekanto, 2002) yang menyatakan bahwa optimalisasi dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu pencapaian *output*, pencapaian *outcome*, dan pencapaian *impact*. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di satu lokasi penelitian, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya selama 21 hari dari tanggal 6 sampai dengan 25

Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis optimalisasi pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya menggunakan teori optimalisasi menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) yang dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu pencapaian *output*, pencapaian *outcome*, dan pencapaian *impact*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian *Output*

Dalam pengelolaan anggaran daerah, output kinerja diukur melalui efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang mencerminkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, di Kabupaten Jayawijaya, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM yang kompeten, minimnya pelatihan teknis, gangguan sistem, serta infrastruktur yang belum memadai, termasuk jaringan internet dan perangkat teknologi. Akibatnya, target output seperti ketepatan alokasi anggaran, efisiensi pengelolaan, dan ketepatan waktu pelaporan keuangan belum sepenuhnya tercapai. *Priority directions to ensure effective state management mechanisms of the regional development in the conditions of the digital economy formation are substantiated* (Gazuda et al., 2025). Beberapa program mengalami keterlambatan karena ketergantungan pada sistem yang belum stabil. Meskipun demikian, sudah terlihat indikasi perbaikan, terutama dalam hal sistem pelaporan yang mulai berjalan lebih sistematis dan terdokumentasi. Dengan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta komitmen lintas sektor, SIPD diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih profesional dan transparan.

3.2. Pencapaian *Outcome*

Outcome sering kali dikaitkan dengan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam suatu program atau kebijakan, yang mencerminkan dampak jangka menengah hingga jangka panjang dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam konteks pengelolaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya, outcome diharapkan dapat terwujud dalam bentuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Pencapaian outcome ini sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas pihak yang berwenang dalam mengelola sistem, serta arah kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. *Anticipated outcomes encompass improved decision-making in asset and facility management, leading to heightened operational efficiency and effectiveness* (Alkhard, 2024). Akan tetapi, hingga saat ini, penggunaan SIPD di Kabupaten Jayawijaya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang bersifat struktural dan teknis. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam pengoperasian sistem digital, gangguan teknis yang kerap terjadi pada sistem SIPD seperti error dalam input data atau tidak sinkronnya data antar perangkat daerah, serta keterbatasan

jaringan internet yang mengakibatkan lambatnya akses dan pengunggahan data penting.

3.3. Pencapaian *Output*

Output kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah diukur melalui tercapainya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, yang mencerminkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya masih belum optimal akibat sejumlah kendala seperti keterbatasan SDM yang kompeten secara teknis, minimnya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat, serta gangguan teknis pada aplikasi SIPD yang menghambat proses input dan pengolahan data. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan internet yang tidak merata dan perangkat teknologi yang terbatas, semakin memperparah hambatan implementasi. Dampaknya, target output seperti alokasi anggaran yang tepat sasaran, efisiensi pengelolaan, dan ketepatan pelaporan keuangan belum sepenuhnya tercapai, ditandai dengan keterlambatan dalam perencanaan dan realisasi program. Kendati demikian, mulai terlihat perbaikan dalam sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, menunjukkan bahwa dengan perbaikan berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, dan komitmen lintas pihak, SIPD berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan profesional.

3.4. Pencapaian *Outcome*

Outcome dalam pengelolaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya diharapkan terwujud dalam bentuk tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien sebagai dampak jangka menengah hingga panjang dari implementasi sistem tersebut. Namun, hingga kini, pencapaian outcome tersebut belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, gangguan teknis pada sistem SIPD yang menyebabkan error dan ketidaksinkronan data, serta infrastruktur jaringan internet yang belum merata sehingga memperlambat proses penginputan dan pengunggahan data. Kurangnya pendampingan teknis dari pemerintah pusat dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah turut memperburuk situasi, sehingga indikator outcome seperti efisiensi anggaran, akurasi pelaporan keuangan, dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis anggaran belum menunjukkan capaian yang memuaskan. Tanpa evaluasi menyeluruh dan perbaikan yang sistematis, SIPD berisiko menjadi sekadar alat administratif tanpa dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta investasi serius pada infrastruktur digital untuk memastikan outcome implementasi SIPD dapat tercapai sebagaimana tujuan awalnya.

3.5. Pencapaian *Impact*

Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan,

akuntabel, dan efisien, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak diterapkan pada tahun 2020, SIPD digunakan untuk mendokumentasikan penatausahaan keuangan secara elektronik dan menyusun dokumen perencanaan seperti RKPD secara lebih terintegrasi dan berbasis data valid. *This comprehensive approach fosters improved decision-making in asset and facility management, leading to enhanced overall efficiency. Successful implementation and further research on this strategy contribute to AIM analysis advancement and metadata utilization optimization, elevating asset management practices in the evolving construction and infrastructure industry* (Vayyala, 2025). Meskipun demikian, optimalisasi sistem masih diperlukan terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur pendukung. Sebelumnya, BPKAD menggunakan SIMDA yang juga bertujuan mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel, namun transisi ke SIPD dilakukan demi penyajian data yang lebih real-time dan sistematis. Implementasi SIPD juga memungkinkan pelaporan keuangan seperti SPD, SPM, SPJ, SP2P, dan SPP dilakukan secara elektronik melalui dashboard Kemendagri, termasuk penyusunan laporan arus kas yang telah dilakukan hingga tahun 2022 dan masih menunggu hasil audit BPK untuk tahun 2023. Sasaran utama dari program ini adalah terciptanya pengelolaan informasi keuangan dan aset daerah yang optimal dengan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, diawali dengan proses login dan aktivasi akun oleh pengguna yang telah diotorisasi oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua SIPD di Kabupaten Jayawijaya.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu sasaran utama dalam penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Jayawijaya yang berfungsi sebagai instrument penting, dalam pelaksanaan proses perencanaan. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tenang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan pemvangunan darah dengan perencanaan pembangunan. Konsep ini tidak terlepas drai prinsip good governance,

Selain itu, esensi utama dari penerapan SIPD, sebagaimana ditegaskan dalam wawancara sebelumnya, adalah untuk mendorong kinerja aparatur yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan, serta untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya, Agustinus Marian, S.Sos, dalam wawancara pada hari yang sama,

> "SIPD di Kabupaten Jaayawijaya telah diterapkan sejak 2020, sejalan dengan visi pimpinan nasional, khususnya arahan Presiden Joko Widodo pada saat itu, dalam mendorong transformasi birokrasi sebagai bagian dari penerapan good governance. Saat ini, segala hal di tuntut untuk dapat diakses dengan mudah, mulai dari informasi kinerja pemerintahan hingga pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui penerapan SIPD inilah, pemerintah berupaya mewujudkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi tersebut".

SIPD yang diterapkan di BPKAD Kabupaten Jayawijaya telah mengadopsi prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain akuntabilitas, integritas, transparansi, pengendalian, serta prinsip Value for Money (Sholeh, C., & Rochmansjah, 2010). Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan BPKAD Kabupaten Jayawijaya turut mengevaluasi kesesuaian

prinsip-prinsip tersebut dengan nilai-nilai good governance, khususnya dalam konteks pelaporan keuangan. Keberadaan SIPD dirasakan sangat membantu ASN dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana juga diraakan oleh ASN dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana juga dirasakan oleh ASN di BKAD Kota Pekanbaru, terutama dalam hal penetapan standar harga barang (Vitrian, N., AgustiaWAN, & Ahyaruddin, 2022). Penerapan prinsip good governance ini tercermin secara langsung melalui dashboard SIPD, yang dapat diakses oleh pengguna akun Pemda Kabupaten Jayawijaya.

Target penerapan merupakan serangkaian langka yang dirancang untuk mewujudkan suatu gagas menjadi hasil nyata, dengan mempertimbangkan berbagai alternative guna mencapai ouput yang optimal. Di BPKAD Kabupaten Jayawijaya, target penerapan pengelolaan keuangan melalui SIPD telah dirumuskan secara sistematis. Dalam wawancara dengan Manuli Siep, satf BPKAD Kabupaten Jayawijaya, dijelaskan bahwa,

> "Penetapan target memerlukan formulasi kebijakan yang tidak hanya melibatkan institusi, tetapi juga para pelaksana kebijakan. Dalam prosesnya, dilakukan rapat koordinasi bersama pimpinan untuk mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya. Setelah dicapai kesepakatan, perencanaan disusun dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Monitoring dan evaluasi pun menjadi rutinitas untuk mengurangi potensi risiko dalam pengambilan keputusan".

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BPKAD Tahun 2020, deisebutkan bahwa target pencapaian diselaraskan dengan RPJMD 2018-2023, yang memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas, dan Berbudaya", serta misi kedua yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Esesnsi dari misi tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala NPKAD Kabupaten Jayawiaya, Agustinus Marian, S.Sos dalam wawancara pada Selasa, 7 Januari 2025, menegaskan bahwa,

> "Permendagri Nomor 20 Tahun 2019, khsusnya pasal 20 dan 21, menekankan pentingnya pengelolaan informasi keuangan daerah, terutama dalam aspek akutansi dan pelaporan digital. SIPD sangat membantu dalam pencapaian target tersebut, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik"

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jayawijaya melalui SIPD telah dituangkan dalam format pelaporan yang diinput ke dalam sistem SIPD Kemendagri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5, yang memuat rincian Pendapatan Daerah, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD Tahun 2024, sebagai bagian dari pelaksanaan Renja 2024 yang disusun tahun 2023.

Dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa target penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Jayawijaya difokuskan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja ASN, demi mendukung akuntabilitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya telah menjalankan pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD). Peneliti menemukan temuan penting yakni penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan ada beberapa kendala, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang memahami sistem, serta masih adanya gangguan teknis pada aplikasi SIPD. Sama halnya dengan penelitian Wawan Giri Santoso yang menemukan bahwa kabupaten Subang masih terdapat kekurangan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga implementasi SIPD di Kabupaten Subang mengalami beberapa hambatan (Santoso, 2022). Bukan hanya itu, penelitian Muhammad Zaky Harahap menemukan bahwa Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif, dan tujuan dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) itu sendiri belum tercapai dengan maksimal (Harahap, 2022). Sama halnya juga dengan penelitian Ganjar Pamungkas yang menemukan bahwa implementasi SIPD pada Pemerintah DIY dan Pemerintah Provins Jawa Barat belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah (Pamungkas, 2022).

Hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya berasal dari faktor internal maupun eksternal. Secara internal kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman pegawai terhadap teknologi dan penggunaan aplikasi SIPD, yang menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaky Harahap yang menyebutkan bahwa keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi berdampak pada tidak optimalnya pengoperasian SIPD (Harahap, 2022).

Hambatan lainnya dari faktor eksternal muncul akibat lambatnya respon dari kementerian Dalam Negeri saat BPKAD menyampaikan masalah yang dihadapi. Hal ini juga diperparah dengan kualitas jaringan yang belum cukup memadai dalam mendukung proses pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Jayawijaya. Sama halnya juga dengan penelitian Nadya Prameswari (Prameswari, 2021), menemukan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahah Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perolehan Opini Audit BPK.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memberikan dampak positif dalam memudahkan pengelolaan anggaran daerah layaknya temuan penelitian Grace T. Pontoh, Darwis, dan Darmawati (Pontoh & Reza, 2024), penelitian Ermina Siregar, Iskandar Sam, dan Wiwik Tiswiyanti (Siregar et al., 2025) dan penelitian Nurmila Daud, Harun Blongkod, dan Nilawaty Yusuf (Daud et al., 2025). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Nadya Balqis dan Zuhrizal Fadhly yang menemukan bahwa SIPD memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja (DISNAKER) (Balqis et al., 2021). SIPD diharapkan mampu dalam mendorong kinerja aparatur yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan, serta untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Jayawijaya masih menghadapi beberapa hambatan yaitu minimnya Sosialisasi, seperti kurangnya kegiatan pelatihan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait penggunaaan SIPD, masih terdapat masalah teknis operasional, seperti terjadinya error pada sistem saat penggunaan SIPD, dan

kurangnya respon atau tindak lanjut dari pemerintah pusat terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menemukan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sangat penting dalam menunjang penerapan SIPD dalam pengelolaan anggaran daerah.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya masih belum berjalan secara optimal. Pencapaian *output* seperti peningkatan ketetapan alokasi anggaran, efisiensi dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya dapat terealisasi secara maksimal. Pencapaian *outcome* dalam penggunaan SIPD di Kabupaten Jayawijaya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, gangguan teknis pada sistem, serta keterbatasan jaringan internet. Pencapaian *impact* meliputi target penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Jayawijaya difokuskan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja ASN, demi mendukung akuntabilitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. BPKAD Kabupaten Jayawijaya menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan anggaran daerah menggunakan SIPD di Kabupaten Jayawijaya, yaitu minimnya sosialisasi, masih terdapat masalah teknis operasional, dan kurangnya respon atau tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait kendala yang dihadapi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, adanya keterbatasan informasi dalam meneliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti selama proses penelitian dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan anggaran daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Jayawijaya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya beserta jajarannya serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alkhard, A. (2024). Enhancing Asset Management Through Integrated Facilities Data, Digital Asset Management, and Metadata Strategies. *Construction Economics and Building* , *24*(3), 76–94. https://doi.org/10.5130/AJCEB.v24i3.8741

Gazuda, M., Tyukhtenko, N., Lomachynska, I., Dunai, M., Vernydub, V., & Babich, R. (2025). THE IMPACT OF DIGITALIZATION AND E-GOVERNANCE ON TRANSFORMATION OF STATE MANAGEMENT MECHANISMS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, *103*(3), 956–968.

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-86000502368&partnerID=40&md5=6489f6fdbfd8917e63cab88ffc0aaebe

Vayyala, R. (2025). Metadata management and its role in data governance. In *Data Governance, DevSecOps, and Advancements in Modern Software* (pp. 47–71). https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0365-9.ch003

Yamin, N. Y., Lawaidjo, M. R., & Ridwan. (2025). Moderation of Human Resource Competencies in Quality of Financial Statements: Application of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, and Control Environment. *Journal of Ecohumanism*, *4*(1), 1539–1551. https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5968

Badung, B. (2019). *Catatan Atas Laporan Keuangan*. https://ppid.badungkab.go.id/front/dokumen/download/300290952

Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *11*(1), 146–161. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953

Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.

Daud, N., Blongkod, H., & Yusuf, N. (2025). *The Effect of the Implementation of Local Government Information Systems (SIPD) and Human Resources on Regional Financial Management Accountability*. *3*(1), 51–59. https://doi.org/10.59613/mjbms.v3i1.207

Harahap, M. Z. (2022). Evaluasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan. *Ipdn*. http://eprints.ipdn.ac.id/9265/

Pamungkas, G. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat*. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209397

Pontoh, G. T., & Reza, M. (2024). *Improved Regional Financial Reporting Through Effective Information Technology and Regional Financial Accounting Systems*. 2806–2819. https://www.journal.esrgroups.org/jes/article/view/5673/4048

Prameswari, N. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga*. *75*(17), 399–405. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKD3APIzNoMwIAcOrLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1749391375/RO=10/RU=http%3A%2F%2Feprints.ipdn.ac.id%2F8458%2F1%2FNADYA%2520PRAMESWARI_29.0831_PENGARUH%2520PENERAPAN%2520SISTEM%2520INFORMASI%2520PEMERINTAH%2520DAERAH%2520DAN%2520KUALITAS%2520LAPORAN%2520KEUANGAN%2520PEMERINTAH%2520DAERAH%2520TERHADAP%2520PEROLEHAN%2520OPINI%2520AUDIT%2520BPK%2520TAHUN%25202021%2520DI%2520KABUPATEN%2520PURBALINGGA-2.pdf/RK=2/RS=wp5ITOUwmMRMQVd6NOThlSAEdk4-

Santoso, W. G. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUBANG. *Rancang Bangun Sistem Pengendali Pintu Garasi Otomatis*, 0–1. http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56422

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.

Siregar, E., Sam, I., & Tiswiyanti, W. (2025). *The Influence of the Implementation of Local Government Information Systems , Human Resources , and Internal Control on the Qualitative Characteristics of Jambi City Government Financial Reports*. *4*(2), 461–476. http://dx.doi.org/10.55927/ajma.v4i2.14054

Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto*. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Yanto, F., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kota Pangkal. *YUME : Journal of Management*, *8*(1), 977–985. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/820